

BAB IV

PENUTUP

4.1.KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara kepulauan perlu keharusan memiliki matra laut yang kuat dan terkoordinasi dengan baik merupakan suatu hal yang mutlak. Karena negara kepulauan mempunyai keuntungan yang beraneka ragam. Karena negara kepulauan didominasi oleh wilayah perairan dan setiap bentangan yang memperluas suatu negara sampai sejauh 200 mil, maka menjadi hak negara untuk mengelola sumberdaya laut yang terdapat di dalamnya. Hal tersebut dapat menjadi salah satu sebab terjadinya konflik antar negara, adanya hasil laut yang melimpah dan letak geografis yang saling berdekatan dapat memicu datangnya berbagai konflik yang sangat besar khususnya pada persengketaan atau konflik perebutan wilayah perbatasan dibuktikan dengan telah terjadinya beberapa konflik dengan negara-negara tetangganya menyangkut perebutan wilayah.

Pada tahun 2005-2009, terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia yang memperebutkan Blok Ambalat. Persengketaan ini diawali dengan adanya klaim Malaysia yang mengaku bahwa Ambalat merupakan bagian dari wilayah negaranya, sengketa wilayah yang dilakukan Malaysia bukan terjadi pertama kalinya hal ini sudah terjadi sebelumnya pada Kepulauan Sipadan dan Ligitan. Klaim sepihak Malaysia terhadap blok Ambalat merupakan salah satu ancaman terhadap kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Malaysia mengklaim blok Ambalat berdasarkan peta wilayah Malaysia tahun 1979. Kronologis munculnya

peta Malaysia yang menjadi dasar klaim atas Blok Ambalat, dimulai pada tahun 1979, Malaysia membuat peta secara sepihak.

Oleh sebab itu Indonesia pada dasarnya harus memiliki pertahanan militer guna melindungi wilayahnya. Dengan adanya penempatan kekuatan militer pada Matra Laut yang laut yang kuat, berkualitas dan tentunya dengan dilengkapi penguasaan teknologi militer yang modern pertahanan keamanan di suatu negara akan sangat berguna untuk melaksanakan pemberdayaan hasil laut, melakukan pengembangan dan pembangunan kekuatan Matra Laut dan menegakkan hukum dan keamanan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum Nasional dan Internasional. Dengan terpenuhinya alat utama sistem persenjataan seperti kapal cepat, dan persenjataan militer yang memadai, menjadi salah satu pendukung utama guna pencegahan kejahatan laut dan ancaman secara cepat dan tepat. Dalam penelitian ini menggunakan tiga kerangka pemikiran sebagai dasar analisa konflik sengketa blok Ambalat:

Pertama, realis sebagai alat analisa dalam interaksi dunia internasional yang berpotensi menimbulkan konflik, pemikiran tersebut percaya akan negara sebagai aktor utama dan tidak adanya otoritas utama dalam sistem internasional sehingga membuat suatu negara mengembangkan kekuatan/powernya masing-masing. Dalam perspektif realis, kekuatan nasional sangat amat berperan dalam pertahanan suatu negara, kerana pemikiran ini menilai negara adalah sebagai aktor utama dan wilayah teritorial termasuk dalam elemen yang harus dimiliki suatu negara yang juga akan menentukan *national power* negara tersebut.

Selain itu, mengkaji dari asumsi dasar pemahaman realis yang sangat memberikan perhatian tinggi terhadap nilai-nilai keamanan nasional serta eksistensi suatu negara yang meyakini bahwa hubungan internasional bersifat konfliktual dan konflik yang terjadi hanya dapat diselesaikan melalui perang, maka Indonesia yang juga telah mengalami berkali-kali konflik serupa, saat ini perlu mengembangkan kekuatan militer guna mempersiapkan diri demi mempertahankan wilayah terluar sehingga dapat terjaganya kedaulatan Indonesia. Esensi kedaulatan yang menjadi ciri negara berdaulat menjelaskan bahwa keberadaan Malaysia dengan klaimnya akan menjadi permasalahan tersendiri yang akan terus mengganggu kedaulatan Indonesia. Upaya untuk mempertahankan kedaulatan inilah yang kemudian memicu konflik antara Indonesia-Malaysia.

Kedua, military readiness, pemikiran ini saya gunakan sebagai alat analisa untuk melihat bentuk modernisasi kekuatan militer. *Kekuatan militer* tersebut adalah bentuk postur pertahanan suatu negara yang meliputi empat aspek utama salah satunya *Modernization* atau modernisasi, *the rate at which a nation is replacing or adding to its major equipment* (tingkat di mana suatu bangsa menggantikan atau menambah peralatan utama). Modernisasi militer merupakan upaya kesiapan militer yang fokus pada kemampuan negara dalam mengganti setiap persenjataan yang sudah tidak layak pakai atau melakukan peningkatan jumlah persenjataan. Selain itu, modernisasi juga menekankan pada upaya untuk melakukan pergantian senjata yang lebih modern dan canggih. Dengan kata lain, modernisasi persenjataan militer tidak hanya menekankan pada kuantitas tetapi

juga kualitas persenjataan yang siap dalam penggelaran operasi militer di medan tempur dan sesuai dengan karakter ancaman yang ada. Indonesia selaku negara kepulauan yang juga telah digambarkan pada bagan bagan di atas menjelaskan belum maksimalnya bentuk modernisasi persenjataan alutsista Indonesia pada tahun 2008-2009 dalam menjaga wilayah kedaulatan dari adanya ancaman klaim Malaysia terhadap blok Ambalat. Adapun peningkatan yang terjadi pada beberapa tahun yang telah dipaparkan, tidaklah mencapai jumlah yang harus dimiliki Indonesia dengan luas wilayah dari laut maupun darat.

Ketiga, Sea Power/kekuatan laut sebagai alat analisa dalam melihat peranan angkatan laut suatu negara dalam menjaga wilayah teritorialnya yang mencakup kesiapan modernisasi alutsista. Kerangka pemikiran sea power memiliki enam prinsip karakteristik yang mempengaruhi kondisi kekuatan laut bangsa seperti letak geografis, sumberdaya alam dan iklim, luas wilayah, karakter masyarakat dan karakter pemerintahannya. Pemikiran *Sea power* ini menjelaskan pentingnya kekuatan laut bagi negara maritim guna melindungi wilayah dan kepentingan nasionalnya.

Ketidaksiapan Indonesia dalam menjaga wilayah perairan dapat dilihat dari adanya kondisi satuan dan sarana operasional Kodam VI/Tanjung Pura yang belum memadai, antara lain personel militer dan PNS yang mencapai \pm 65 %, senjata 75,7 %, Munisi 90 %, kendaraan darat 85,5 %, kendaraan air 57,4 %, perlengkapan satuan 20 %, Alsatri 95 % dan kondisi pangkalan 49,39 %. Hal tersebut membuktikan masih minimnya peran pemerintah dalam mengontrol wilayah perbatasan yang rawan dalam adanya provokasi pihak asing akibat tidak

maksimalnya tindakan-tindakan yang dilakukan Indonesia baik dalam pelaksanaan kebijakan ataupun dalam kesiapan militer. Indonesia selaku negara kepulauan tidak dapat mengembangkan bentuk kekuatan laut yang berkualitas lebih tinggi dari pada alutsista darat.

Karena pada idealnya bentuk modernisasi suatu negara dapat dibuktikan dengan kesinambungan peningkatan jumlah atau kualitas persenjataan dari tahun ketahun, dengan begitu suatu negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjaga wilayah teritorialnya. Sedangkan Indonesia saat ini khususnya pada tahun 2005-2009 dengan adanya alutsista yang dimiliki hanya mampu menjaga diwilayah pantai dan itu pun hanya beberapa alutsista yang siap baik armada maupun persenjataan didalamnya.

Karena anggaran pertahanan yang riil untuk membiayai kegiatan operasi, pemeliharaan Alutsista, dan pembangunan kekuatan pertahanan berada di bawah kebutuhan minimal. Tugas-tugas pertahanan dalam negeri, yakni dalam kerangka mengatasi konflik yang berdimensi keutuhan wilayah NKRI, menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia semakin menyadarkan betapa pentingnya kesiap-siagaan pertahanan, baik personel maupun Alutsista, serta dukungan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan operasi.

Di sisi lain, kenyataan bahwa Alutsista TNI banyak berusia tua, tetapi masih dipertahankan karena proses regenerasi berupa pengadaan Alutsista generasi baru untuk menggantikan Alutsista yang sudah usang berjalan sangat lambat.

4.2. SARAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan di dalam penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa terdapat bentuk kesiapan modernisasi alutsista yang masih sangat kurang. Hal itu menggambarkan ketidakmampuan Indonesia dalam mempersiapkan kemampuan pertahanannya dalam menghadapi ancaman yang ada. Terdapat poin penting sebagai hasil analisa penelitian ini, yaitu tidak adanya kesiapan modernisasi militer Indonesia dalam hal kekuatan lautnya dalam menghadapi konflik Ambalat dengan Malaysia. Untuk itu, penelitian ini coba memberikan saran penelitian, baik berupa rekomendasi kebijakan maupun saran penelitian bagi setiap mahasiswa yang membaca skripsi ini untuk dapat fokus pada apa yang belum terduga dalam isu Ambalat.

Bentuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah setidaknya meliputi pentingnya bagi Indonesia untuk segera melakukan:

1. modernisasi alat utama sistem persenjataan yang mampu menghadapi berbagai ancaman, terutama ancaman kedaulatan di wilayah laut mengingat masih banyaknya potensi ancaman kedaulatan teritorial.
2. Perlunya bagi Indonesia untuk segera beradaptasi pada kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan untuk segera membangun kekuatan laut sebagai bagian dari pembangunan kekuatan militer negara maritim.
3. Segera melakukan berbagai eksploitasi sumber daya alam yang berharga bagi keberlangsungan Indonesia

Sedangkan saran penelitian jika terdapat mahasiswa lain yang berminat mengambil isu yang sama, maka dapat menganalisa pada berbagai fokus penelitian yang belum menjadi fokus pada penelitian ini. Saran yang diberikan adalah penggambaran kesiapan sistem pertahanan Indonesia yang tidak hanya fokus pada modernisasi, namun dapat menyentuh aspek-aspek lain, seperti:

1. Upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi konflik Ambalat.
2. Kemampuan anggaran pertahanan Indonesia dalam mendukung permasalahan Indonesia dalam memodernisasi persenjataan, terutama persenjataan yang menunjang kemampuan laut Indonesia.

